



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mahfudiyah**
Jabatan : Kepala Biro Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 April 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hukum



Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Mahfudiyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1	Indeks Reformasi Hukum KKP (indeks)	85
		2	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (indeks)	85
		3	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	100
		4	Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		5	Persentase Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		6	Persentase Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100
		7	Persentase Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100
		8	Nilai Kinerja Pengelolaan JDIH KKP (nilai)	92
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup Biro Hukum	9	Nilai Penilaian SAKIP Biro Hukum (nilai)	87
		10	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Biro Hukum (indeks)	87
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Hukum (%)	100
		12	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	85
		13	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)	≥95
		14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP (%)	100
		15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Biro Hukum (nilai)	75

Data anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	7.885.756.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	6.740.644.000
Total Anggaran Biro Hukum Tahun 2025		14.626.400.000

Jakarta, April 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hukum



Mahfudiyah